

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Aronson, Mark et al, *Judicial Review of Administrative Action*, Thomson, Lawbook Co., Sydney, 2004.
- Berge, J.B.J.M Ten dan N.M. Spelt, *Pengantar Hukum Perizinan*, Cet 1, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Biezeveld, G.A., *Course of Environmental Law Enforcement*, Syllabus, Surabaya, 1995, h.7.
- Daim, Nuryanto A., *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Djatmiati, Tatiek Sri et.al., *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Djatmiati, Tatiek et.al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi : Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Fadli, Moh., Mukhlis, dan Mustafa, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, 2016.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Peradaban, 2007;
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara Edisi Revisi Buku II Cetakan Ke empat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Jansen, Oswald, *Comparative Inventory of Silencio Positivo*, Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht School of Law, Utrecht, 2008.
- Manan, Bagir, *Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak Dipublikasi, Jakarta, 1955.
- Nicolai, P., et. al., *bestruurecht*, Amsterdam, 1994.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Sarna, Kadek et al., *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, h. 152 University Press, Surabaya, 2015.
- Shidarta, *Karakter Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan Alumni*, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Stout, H.D., *De Betekenissen van de Wet*, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994
- Suparni, Ninik, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Sanksi Lingkungan Hidup*, PT Sinar Ghalia, Jakarta 1992.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .
- Yasin, Muhammad, et.al., *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Depok, 2017.

SURAT KABAR

Rahardjo, Dwi Bowo dan Fakhri Fuadi Muslim, “Kalah di PTUN Soal Reklamasi Pulau G, Pemprov DKI Pertimbangkan Ajukan PK”, Suara.com (*online*), 13 Mei 2020, <https://www.suara.com/news/2020/05/13/215827/kalah-di-ptun-soal-reklamasi-pulau-g-pemprov-dki-pertimbangkan-ajukan-pk?page=all>.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Galang Asmara, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dari Sistem Pemerintahan dan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, **Disertasi**, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226), kemudian diubah dengan PERPU RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456), kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1751).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

INTERNET

Hasanah, Sovia, “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum”, www.hukumonline.com, 28 Mei 2019, dikunjungi pada 5 Desember 2020.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Dewi, Dahlia Kusuma et al, ‘Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Januari 2014.

Julyanto, Mario dan Adiya Yuni Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, *Jurnal Crepido*, Vol 01, No 01, 2019.

Kosasih, Ade, ‘Analisa Kritis Gugatan *Voluntair* terhadap Praktik Maladministrasi di Bidang Pelayanan Publik’, *Mizani*, Vol 26, No 1, 2016.

Malik, ‘Telaah Makna Hukum Putusan MK Yang Final dan Mengikat’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009 MK.

Simanjuntak, Enrico, ‘Prospek Prinsip Fiktif Positif dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia’, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 7, No 2, 2018.

————— ‘Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya’, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 6, No 3, 2017.

Siombo, Marhaeni Ria, ‘Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan’, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14, No 3, 2014.

Utama, Kartika Widya, ‘Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif’, *Notarius*, Vol 08, No 2, September 2015.

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja